



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA AKSI KINERJA

2026

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadiran Tuhan yang maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Kinerja (RENAKSI) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun 2026, yang memuat Target Kinerja BP3KP Kalimantan I serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun khususnya tahun anggaran 2026.

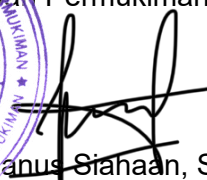
Dokumen Rencana Aksi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I memuat gambaran Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, esensi penyusunan Rencana Aksi Kinerja, tugas dan fungsi entitas, struktur organisasi, dan isu strategis yang dihadapi pada lingkup Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I. Kemudian dokumen ini juga membahas mengenai penetapan kinerja yang terdiri dari penetapan target kinerja setiap triwulan. Dalam setiap pembahasan, dokumen ini menjabarkan secara teknis rencana kinerja dari 5 (lima) Unit Organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Kami berharap Rencana Aksi Kinerja ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I. Kami menyadari bahwa Rencana Aksi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun Anggaran 2026 ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Aksi Kinerja ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Aksi Kinerja ini. Semoga Tuhan selalu menyertai segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Pontianak, 10 April 2026



Kepala
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kalimantan I,


Octavianus Siahaan, S.T., M.Si.
NIP. 198710222010121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	6
1.1. LATAR BELAKANG	6
1.2. TUGAS DAN FUNGSI	7
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	8
1.4. ISU STRATEGIS.....	9
BAB 2 PENETAPAN KINERJA	11
2.1. PENETAPAN TARGET	11
2.1.1. Penetapan Target di bawah Sekretariat Jenderal	11
2.1.2. Penetapan Target di bawah Ditjen Kawasan Permukiman.....	11
2.1.3. Penetapan Target di bawah Ditjen Perumahan Perdesaan.....	12
2.1.4. Penetapan Target di bawah Ditjen Perumahan Perkotaan.....	14
2.1.5. Penetapan Target di bawah Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	15
BAB 3 PENUTUP	17
LAMPIRAN	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Susunan Organisasi UPT	8
Tabel 2.1 Penetapan Target Kinerja TA.2026 BP3KP Kalimantan I (Sekretariat Jenderal)	11
Tabel 2.2 Penetapan Target Kinerja TA.2026 BP3KP Kalimantan I (Ditjen Kawasan Permukiman)	12
Tabel 2.3 Penetapan Target Kinerja TA.2026 BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perdesaan)	13
Tabel 2.4 Penetapan Target Kinerja TA.2026 BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perkotaan)	14
Tabel 2.5 Penetapan Target Kinerja TA.2026 BP3KP Kalimantan I (Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko)	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3.1 Struktur Organisasi UPT.....	9
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Sekretariat Jenderal)	18
Lampiran 2 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Sekretariat Jenderal)	19
Lampiran 3 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Sekretariat Jenderal)	20
Lampiran 4 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (Sekretariat Jenderal)	21
Lampiran 5 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Ditjen Kawasan Permukiman).....	22
Lampiran 6 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Ditjen Kawasan Permukiman)	23
Lampiran 7 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Ditjen Kawasan Permukiman)	24
.....	
Lampiran 8 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (Ditjen Kawasan Permukiman)	25
.....	
Lampiran 9 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perdesaan).....	26
Lampiran 10 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perdesaan)	27
Lampiran 11 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Ditjen Perumahan Perdesaan)	29
.....	
Lampiran 12 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (Ditjen Perumahan Perdesaan)	30
.....	
Lampiran 13 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perkotaan).....	31
Lampiran 14 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perkotaan)	32
Lampiran 15 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Ditjen Perumahan Perkotaan)	33
.....	
Lampiran 16 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (Ditjen Perumahan Perkotaan)	34
.....	
Lampiran 17 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko).....	35
Lampiran 18 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko) ..	36



BAB I

PENDAHULUAN



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I merupakan langkah strategis untuk menjamin ketercapaian sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). BP3KP Kalimantan I sebagai unit pelaksana teknis di wilayah Kalimantan khususnya dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki mandat penting dalam mendukung kebijakan nasional terkait penyediaan rumah layak huni, penataan kawasan kumuh, serta pengembangan permukiman baru yang berkelanjutan.

Secara khusus, latar belakang penyusunan rencana aksi ini didorong oleh beberapa faktor:

- a. Kebijakan Nasional dan Target RPJMN. Pemerintah menargetkan pengurangan *backlog* perumahan dan peningkatan kualitas permukiman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Balai berperan sebagai ujung tombak implementasi kebijakan tersebut di tingkat regional.
- b. Kondisi Wilayah Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah. Tantangan geografis berupa keterbatasan aksesibilitas, ketersediaan lahan, serta kebutuhan infrastruktur dasar menuntut adanya perencanaan kinerja yang adaptif dan kontekstual.
- c. Akuntabilitas dan Transparansi. Rencana aksi kinerja menjadi instrumen untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat diukur, dievaluasi, serta dipertanggungjawabkan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Koordinasi Lintas Sektor. Penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat agar hasil pembangunan lebih berdaya guna dan berkelanjutan.
- e. Optimalisasi Sumber Daya: Dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, rencana aksi kinerja berfungsi sebagai pedoman untuk memprioritaskan program yang paling berdampak, sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan.

Dengan demikian, penyusunan Rencana Aksi Kinerja bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan upaya sistematis untuk mengintegrasikan visi pembangunan nasional dengan kebutuhan lokal. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi acuan operasional dalam mengarahkan kegiatan balai secara terukur, memperkuat peran strategis Kalimantan sebagai wilayah pengembangan baru, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa Unit Pelaksana Teknis atau disingkat dengan UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT dalam hal ini secara khusus yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara teknis berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I mempunyai tugas, yaitu:

- a. Melaksanakan penyediaan perumahan;
- b. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Melaksanakan pengembangan kawasan permukiman;
- d. Melaksanakan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial; dan
- e. Melaksanakan fasilitasi serah terima aset.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I sebagai UPT menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;

- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

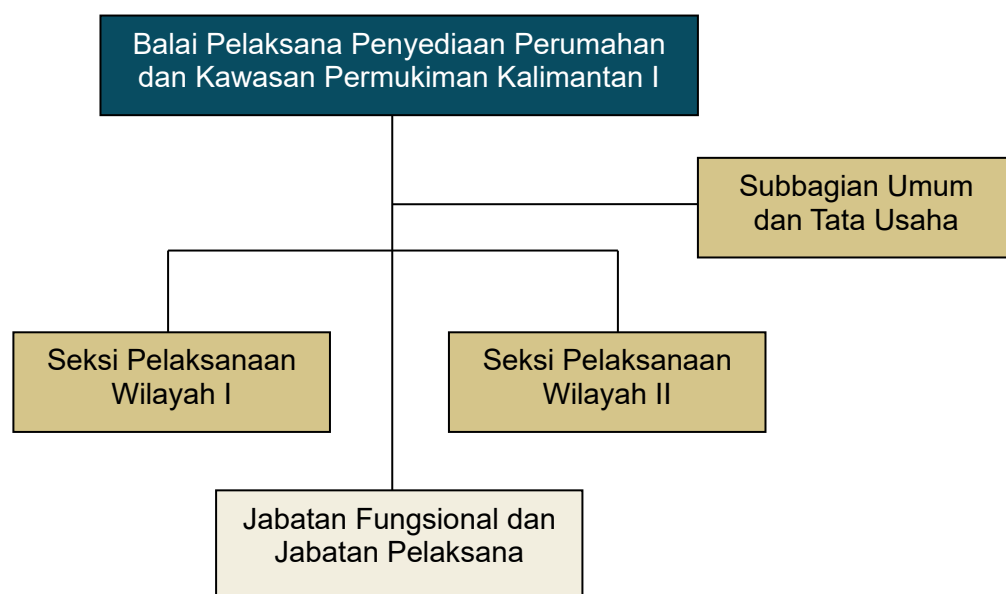
Susunan Organisasi UPT, dalam hal ini Balai, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Tata Usaha;
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah I;
- c. Seksi Pelaksanaan Wilayah II; dan
- d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Tabel 1.1 Susunan Organisasi UPT

No.	Jabatan	Tugas
1	Subbagian Umum dan Tata Usaha	a. Melakukan penyusunan program dan anggaran, b. Melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, c. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, d. Melakukan pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, e. Melakukan koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.
2	Seksi Pelaksanaan Wilayah I	a. Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial; dan b. Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai

		dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
3	Seksi Pelaksanaan Wilayah II	Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
4	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan



Gambar 1.3.1 Struktur Organisasi UPT

1.4. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembangunan, tetapi juga menyangkut dimensi kebijakan, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berinteraksi. Pertama, tantangan kebijakan nasional berupa target pengurangan backlog perumahan dan penanganan kawasan kumuh menuntut balai untuk menyelaraskan program dengan RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, serta kebijakan daerah. Hal ini memerlukan konsistensi perencanaan, sinkronisasi lintas sektor, dan penguatan kapasitas kelembagaan agar implementasi kebijakan berjalan efektif.

Kedua, dari sisi sosial dan demografi, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Kalimantan menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan perumahan layak huni. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan, sehingga diperlukan inovasi skema subsidi, kredit mikro, maupun kemitraan dengan lembaga keuangan. Selain itu, keberagaman budaya dan pola permukiman masyarakat lokal menuntut pendekatan pembangunan yang adaptif dan inklusif.

Ketiga, dari aspek ekonomi dan pembiayaan, keterbatasan anggaran pemerintah menjadi isu strategis yang harus diatasi melalui optimalisasi sumber daya, efisiensi program, serta penguatan kemitraan dengan sektor swasta. Fluktuasi harga material konstruksi juga berpotensi meningkatkan biaya pembangunan, sehingga strategi pengadaan dan distribusi material harus dirancang dengan cermat.

Keempat, dari perspektif lingkungan dan tata ruang, keterbatasan lahan di kawasan perkotaan serta potensi konflik penggunaan lahan dengan sektor lain (perkebunan, kehutanan, industri) menjadi tantangan besar. Selain itu, risiko bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor mengancam keberlanjutan permukiman. Oleh karena itu, penataan kawasan harus mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, mitigasi risiko bencana, serta perlindungan lingkungan hidup.

Kelima, sinergi kelembagaan dan tata kelola menjadi isu strategis yang krusial. Keberhasilan program perumahan dan permukiman tidak dapat dicapai hanya oleh Kementerian PKP melalui BP3KP Kalimantan I saja, melainkan membutuhkan koordinasi erat dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, sektor swasta, dan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, serta sistem monitoring dan evaluasi kinerja harus diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan program.

Dengan demikian, isu strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I mencakup tantangan multidimensi yang menuntut pendekatan holistik, integratif, dan adaptif. Penyusunan Rencana Aksi Kinerja harus mampu menjawab isu-isu tersebut melalui strategi yang terukur, berbasis data, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah.



BAB II

PENETAPAN KINERJA



BAB 2

PENETAPAN KINERJA

2.1. PENETAPAN TARGET

Target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I ditetapkan dalam periode triwulan I, II, III, dan IV. Penetapan target kinerja tersebut merujuk pada Dokumen Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I Tahun Anggaran 2026. Berikut ini penetapan target kinerja yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok berdasarkan unit organisasi Sekretariat Jenderal, Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, serta Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

2.1.1. Penetapan Target di bawah Sekretariat Jenderal

Penetapan Target Kinerja pada kegiatan di bawah Sekretariat Jenderal merujuk pada **Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I dan Sekretariat Jenderal** yang ditetapkan pada tanggal **10 April 2026**. Tabel 2.1 menunjukkan Rincian Target Capaian Kinerja per triwulan Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2.1 Penetapan Target Kinerja TA.2026 BP3KP Kalimantan I
(Sekretariat Jenderal)

PKAWAL										
Kode	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET PK		ANGGARAN	AKTIVITAS	Target Capaian Per Triwulan			
			Jumlah	Satuan			Pagu	TW-I	TW-II	TW-III
WA	Program Dukungan Manajemen		16	Layanan, Unit	2.332.106.000		15%	50%	75%	100%
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal		16	Layanan, Unit	2.332.106.000		15%	50%	75%	100%
	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I		16	Layanan, Unit	2.332.106.000		15%	50%	75%	100%
		1) Jumlah Layanan Umum	3	Layanan	117.864.000	1. Layanan Umum Biro Umum	15%	50%	75%	100%
		2) Jumlah Layanan Perkantoran	3	Layanan	2.075.279.000	1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	15%	50%	75%	100%
		3) Jumlah Layanan Saranan Internal	10	Unit	138.963.000	1. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	15%	50%	75%	100%

Pada Program Dukungan Manajemen ditetapkan target sejumlah 16 (enam belas) Layanan/ Unit dengan keluaran berupa Layanan Umum, Layanan Perkantoran, dan Layanan Sarana Internal dengan total anggaran sebesar 2.332.106.000 (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Enam Ribu Rupiah). dengan target capaian per triwulan ditetapkan sebesar 15%, 25%, 75%, dan 100% untuk masing-masing Triwulan I, II, III, dan IV Tahun Anggaran 2026.

2.1.2. Penetapan Target di bawah Ditjen Kawasan Permukiman

Penetapan Target Kinerja pada kegiatan di bawah Ditjen Kawasan Permukiman merujuk pada **Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I dan Ditjen Kawasan Permukiman** yang ditetapkan pada tanggal **27 Maret 2026**. Tabel 2.2 menunjukkan Rincian Target Capaian Kinerja per triwulan Tahun Anggaran 2026.

**Tabel 2.2 Penetapan Target Kinerja TA.2026 BP3KP Kalimantan I
(Ditjen Kawasan Permukiman)**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET PK		ANGGARAN	AKTIVITAS	Target Capaian Per Triwulan			
			Jumlah	Satuan			TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		3	Dokumen, Rekomendasi Kebijakan	220.194.000		15%	50%	75%	100%
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman		3	Dokumen, Rekomendasi Kebijakan	220.194.000		15%	50%	75%	100%
		Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	2	Dokumen, Rekomendasi Kebijakan	131.477.000		15%	50%	75%	100%
		1) Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1	Dokumen	43.800.000	1. Pengelolaan Data dan Informasi Program Satu Juta Rumah di Kawasan Pesisir di Balai Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	15%	50%	75%	100%
		2) Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Rekomendasi Kebijakan	87.677.000	1. Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	15%	50%	75%	100%
		Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Dokumen	88.717.000		15%	50%	75%	100%
		1) Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	Dokumen	88.717.000	1. Pemenuhan Readiness Criteria Lokasi Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta Fasilitasi Serah Terima Aset	15%	50%	75%	100%
WA	Program Dukungan Manajemen		5	Layanan	152.056.000		15%	50%	75%	100%
7674	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		5	Layanan	152.056.000		15%	50%	75%	100%
		Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	5	Layanan	152.056.000		15%	50%	75%	100%
		1) Layanan Umum	3	Layanan	121.256.000	1. Layanan Umum Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	15%	50%	75%	100%
		2) Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	12.300.000	1. Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	15%	50%	75%	100%
		3) Layanan BMN	1	Layanan	18.500.000	1. Penatausahaan BMN Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	15%	50%	75%	100%

Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan target 3 (tiga) Dokumen/Rekomendasi Kebijakan dengan total anggaran sebesar 220.194.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Adapun keluaran dari target kinerja tersebut yaitu; 1) Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman; 2) Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan 3) Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman. Sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen ditetapkan 5 (lima) Layanan dengan total anggaran sebesar 152.056.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan keluaran berupa: 1) Layanan Umum; 2) Layanan Data dan Informasi; dan 3) Layanan BMN. Baik Program Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun Program Dukungan Manajemen, target capaian per triwulan ditetapkan sebesar 15%, 50%, 75%, dan 100% untuk masing-masing Triwulan I, II, III, dan IV Tahun Anggaran 2026.

2.1.3. Penetapan Target di bawah Ditjen Perumahan Perdesaan

Penetapan Target Kinerja pada kegiatan di bawah Ditjen Perumahan Perdesaan merujuk pada **Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I dan Ditjen Perumahan Perdesaan** yang ditetapkan pada tanggal **02 April 2026**. Tabel 2.3 menunjukkan Rincian Target Capaian Kinerja per triwulan Tahun Anggaran 2026.

**Tabel 2.3 Penetapan Target Kinerja TA.2026 BP3KP Kalimantan I
(Ditjen Perumahan Perdesaan)**

PKAWAL										
Kode	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET PK		ANGGARAN	AKTIVITAS	Target Capaian Per Triwulan			
			Jumlah	Satuan			Pagu	TW-I	TW-II	TW-III
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		68	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Unit	15.416.378.000		15%	50%	75%	100%
7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		68	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan, Unit	15.416.378.000		15%	50%	75%	100%
	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan		5	Rekomendasi Kebijakan, Dokumen, Laporan	177.471.000		15%	50%	75%	100%
		1) Jumlah Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan	50.555.000	1. Penyusunan Perencanaan Kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	15%	50%	75%	100%
		2) Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Dokumen	26.448.000	1. Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	15%	50%	75%	100%
		3) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3	Laporan	100.468.000	1. Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	15%	50%	75%	100%
	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan		1	Rekomendasi Kebijakan	21.706.000		15%	50%	75%	100%
		1) Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan	21.706.000	1. Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	15%	50%	75%	100%
	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan		2	Dokumen	59.639.000		15%	50%	75%	100%
		1) Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	1	Dokumen	32.819.000	1. Identifikasi dan Perencanaan Penyiapan Lahan dan Perizinan	15%	50%	75%	100%
		2) Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	1	Dokumen	26.820.000	1. Identifikasi dan Perencanaan Penghunian Perumahan Perdesaan	15%	50%	75%	100%
	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan		1	Rekomendasi Kebijakan	146.152.000		15%	50%	75%	100%
		1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan	146.152.000	1. Penyusunan Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	15%	50%	75%	100%
	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perdesaan		59	Rekomendasi Kebijakan, Laporan, Unit	15.011.410.000		15%	50%	75%	100%
		1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan	20.533.000	1. Penyusunan Perencanaan Teknis Perumahan Perdesaan	15%	50%	75%	100%
		2) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1	Laporan	37.939.000	1. Fasilitasi Pengalihan Aset Pembangunan Perumahan Perdesaan	15%	50%	75%	100%
		3) Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	32	Unit	9.311.318.000	1. Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun dan Pengadaan Meubelair 2. Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun	15%	50%	75%	100%
		4) Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	25	Unit	5.641.620.000	1. Perencanaan Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan 2. Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan dan PSU Pendukungnya 3. Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan	15%	50%	75%	100%
WA	Program Dukungan Manajemen		4	Layanan	71.971.000		15%	50%	75%	100%
7675	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		4	Layanan	71.971.000		15%	50%	75%	100%
	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		4	Layanan	71.971.000		15%	50%	75%	100%
		1) Jumlah Layanan Umum	3	Layanan	55.971.000	1. Layanan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	15%	50%	75%	100%
		2) Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	16.000.000	1. Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi	15%	50%	75%	100%

Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan target 68 (enam puluh delapan) Rekomendasi Kebijakan/ Dokumen/ Laporan/ Unit dengan total anggaran sebesar 15.416.378.000 (Lima Belas Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan

Ribu Rupiah). Sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen ditetapkan 4 (empat) Layanan dengan total anggaran sebesar 71.971.000 (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan keluaran berupa Layanan Umum serta Layanan Data dan Informasi. Baik Program Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun Program Dukungan Manajemen, target capaian per triwulan ditetapkan sebesar 15%, 50%, 75%, dan 100% untuk masing-masing Triwulan I, II, III, dan IV Tahun Anggaran 2026.

2.1.4. Penetapan Target di bawah Ditjen Perumahan Perkotaan

Penetapan Target Kinerja pada kegiatan di bawah Ditjen Perumahan Perkotaan merujuk pada **Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I dan Ditjen Perumahan Perkotaan** yang ditetapkan pada tanggal **30 Maret 2026**. Tabel 2.4 menunjukkan Rincian Target Capaian Kinerja per triwulan Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2.4 Penetapan Target Kinerja TA.2026 BP3KP Kalimantan I
(Ditjen Perumahan Perkotaan)

PKAWAL										
Kode	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET PK		ANGGARAN	AKTIVITAS	Target Capaian Per Triwulan			
			Jumlah	Satuan	Pagu		TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		8	Rekomendasi Kebijakan, Laporan	318.748.000		15%	50%	75%	100%
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		8	Rekomendasi Kebijakan, Laporan	318.748.000		15%	50%	75%	100%
	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemaantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan		4	Rekomendasi Kebijakan, Laporan	141.690.000		15%	50%	75%	100%
		1) Jumlah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Penyelenggaraan perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	61.014.000	1. Pelaksanaan Konsolidasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	15%	50%	75%	100%
		2) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3	Laporan	80.676.000	1. Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	15%	50%	75%	100%
	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan		1	Rekomendasi Kebijakan	36.291.000		15%	50%	75%	100%
		1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	36.291.000	1. Pelaksanaan Konsolidasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	15%	50%	75%	100%
	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan		1	Rekomendasi Kebijakan	36.291.000		15%	50%	75%	100%
		1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	36.291.000	1. Pelaksanaan Konsolidasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	15%	50%	75%	100%
	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan		1	Rekomendasi Kebijakan	52.238.000		15%	50%	75%	100%
		1) Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	52.238.000	1. Pelaksanaan Konsolidasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	15%	50%	75%	100%
	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan		1	Rekomendasi Kebijakan	52.238.000		15%	50%	75%	100%
		1) Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	52.238.000	1. Pelaksanaan Konsolidasi Penyiapan Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	15%	50%	75%	100%

WA	Program Dukungan Manajemen	5	Layanan	115.300.000		15%	50%	75%	100%
7676	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	5	Layanan	115.300.000		15%	50%	75%	100%
	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	5	Layanan	115.300.000		15%	50%	75%	100%
	1) Jumlah Layanan BMN	1	Layanan	54.000.000	1. Rencana Kebutuhan dan Pengelolaan BMN Perumahan Perkotaan Balai P3KP	15%	50%	75%	100%
	2) Jumlah Layanan Umum	3	Layanan	38.750.000	1. Layanan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Balai 2. Layanan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Satker	15%	50%	75%	100%
	3) Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	22.550.000	1. Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi Perumahan Perkotaan di Balai P3KP	15%	50%	75%	100%

Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan target 8 (delapan) Rekomendasi Kebijakan/ Laporan dengan total anggaran sebesar 318.748.000 (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen ditetapkan 5 (lima) Layanan dengan total anggaran sebesar 115.300.000 (Seratus Lima Belas Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan keluaran berupa: 1) Layanan BMN; 2) Layanan Umum; dan 3) Layanan Data dan Informasi. Baik Program Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun Program Dukungan Manajemen, target capaian per triwulan ditetapkan sebesar 15%, 50%, 75%, dan 100% untuk masing-masing Triwulan I, II, III, dan IV Tahun Anggaran 2026.

2.1.5. Penetapan Target di bawah Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Penetapan Target Kinerja pada kegiatan di bawah Ditjen Perumahan Perkotaan merujuk pada **Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I dan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko** yang ditetapkan pada tanggal **28 Januari 2026**. Tabel 2.5 menunjukkan Rincian Target Capaian Kinerja per triwulan Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2.5 Penetapan Target Kinerja TA.2026 BP3KP Kalimantan I
(Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko)

Kode	Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET PK		ANGGARAN	AKTIVITAS	Target Capaian Per Triwulan			
			Jumlah	Satuan			TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		4	Rekomendasi Kebijakan, Laporan	157.614.000		15%	50%	75%	100%
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman		4	Rekomendasi Kebijakan, Laporan	157.614.000		15%	50%	75%	100%
	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel		1	Rekomendasi Kebijakan	33.218.000		15%	50%	75%	100%
	1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas		1	Rekomendasi Kebijakan	33.218.000	1. Penyusunan Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	15%	50%	75%	100%
	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		2	Rekomendasi Kebijakan	97.856.000		15%	50%	75%	100%
	1) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi		2	Rekomendasi Kebijakan	97.856.000	1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko 2. Penyusunan Kebijakan Pencegahan Korupsi	15%	50%	75%	100%
	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman		1	Laporan	26.540.000		15%	50%	75%	100%
	1) Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko		1	Laporan	26.540.000	1. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	15%	50%	75%	100%

Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan target 4 (empat) Rekomendasi Kebijakan/Laporan dengan total anggaran sebesar 157.614.000 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah). Adapun keluaran dari target kinerja tersebut yaitu: 1) Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas; 2) Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi; dan 3) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Target kinerja yang ditetapkan tersebut hanya ada pada unit kerja BP3KP Kalimantan I dengan target capaian per triwulan ditetapkan sebesar 15%, 50%, 75%, dan 100% untuk masing-masing Triwulan I, II, III, dan IV Tahun Anggaran 2026.



BAB III

PENUTUP



BAB 3

PENUTUP

Rencana Aksi Kinerja (RENAKSI) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I disusun sebagai dokumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional, tetapi juga sebagai wujud komitmen kelembagaan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Penyusunan rencana ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menjawab tantangan multidimensi yang dihadapi wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah, mulai dari *backlog* perumahan, keterbatasan lahan, hingga kebutuhan penataan kawasan permukiman yang berkelanjutan. Dengan adanya rencana aksi ini, diharapkan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, dan konsisten dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Lebih jauh, dokumen ini menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah, sehingga setiap langkah yang diambil oleh balai dapat mendukung pencapaian target RPJMN, Renstra Kementerian PKP, serta rencana pembangunan daerah. Rencana aksi ini juga menjadi instrumen untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, karena penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi erat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi rencana aksi bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Selain itu, rencana aksi ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan. Monitoring dan evaluasi kinerja menjadi bagian integral untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan adanya sistem evaluasi yang jelas, balai dapat melakukan perbaikan berkelanjutan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan solusi yang lebih efektif di masa mendatang.

Pada akhirnya, Rencana Aksi Kinerja ini bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan komitmen moral dan profesional untuk menghadirkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan. Penutup ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi rencana aksi akan menjadi tolok ukur bagi kualitas pelayanan publik di bidang perumahan, sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Dengan semangat kebersamaan, integritas, dan inovasi, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I bertekad untuk terus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan.



LAMPIRAN



LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Sekretariat Jenderal)



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Octavianus Siahaan**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Didyk Choiroel
NIP. 197104161992011001

Jakarta, 10 April 2026

Pihak Pertama



Octavianus Siahaan
NIP. 198710222010121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	1 Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
		2 Jumlah Layanan Perkantoran	3 Layanan
		3 Jumlah Layanan Sarana Internal	10 Unit

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I
- 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
- 3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

PAGU APBN

Rp	1,178,181,000.00
Rp	543,847,000.00
Rp	610,078,000.00
Rp	2,332,106,000.00

Jakarta, 10 April 2026

SEKRETARIS JENDERAL



DIDYK CHOIROEL

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I**



OCTAVIANUS SIAHAAN

Lampiran 2 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Sekretariat Jenderal)


 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
 TAHUN ANGGARAN 2026**
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691409/2026


DS:8627-7096-3511-0913

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01

Tanggal : 29 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. Unit Organisasi | : (01) | SEKRETARIAT JENDERAL |
| 3. Provinsi | : (13) | KALIMANTAN BARAT |
| 4. Kode/Nama Satker | : (691409) | Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I |
| Sebesar | : Rp. | 1.178.181.000 (SATU MILIAR SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA SERATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :**Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :**

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.01.WA Program Dukungan Manajemen
 146.01.WA Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

Jumlah Uang

Rp.	1.178.181.000
Rp.	1.178.181.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 1.178.181.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNPB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNPB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencarian dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 1.178.181.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencarian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

 Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

 ttd.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
 TAHUN ANGGARAN 2026
 NOMOR : DIPA- 146.01.1.691409/2026
 I A. INFORMASI KINERJA**


DS:8627-7096-3511-0913

- | | | |
|----------------------------|------------|--|
| Kementerian Negara/Lembaga | : (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Unit Organisasi | : (01) | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Provinsi | : (13) | KALIMANTAN BARAT |
| Kode/Nama Satker | : (691409) | Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I |

Halaman : I A. 1

Program	: 146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.178.181.000
Kegiatan	: 7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	1.178.181.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:		
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
Rincian Output	: 01	EBA.962 Layanan Umum	1.108.700.000
	: 02	EBA.904 Layanan Perkantoran	66.966.000
			1.041.734.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7665.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
Rincian Output	: 01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	69.481.000
			69.481.000

 Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 SEKRETARIS JENDERAL

 ttd.
 DIDYK CHOIROEL
 NIP. 197104161992011001

Lampiran 3 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Sekretariat Jenderal)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691410/2026**



DS.9557-8106-5449-0019

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. Unit Organisasi | : (01) | SEKRETARIAT JENDERAL |
| 3. Provinsi | : (13) | KALIMANTAN BARAT |
| 4. Kode>Nama Satker | : (691410) | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat |
| Sebesar | : Rp. | 543.847.000 (LIMA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA Program Dukungan Manajemen
146.01.WA Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	543.847.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	Jumlah Uang	Rp.	543.847.000
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0		Rp.	543.847.000
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0			
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0			
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0			
			6. SBSN PBS	Rp.	0			

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 543.847.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691410/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



DS.9557-8106-5449-0019

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (691410) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.01.WA	Program Dukungan Manajemen		543.847.000
Kegiatan	: 7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal		543.847.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.00	Layanan, Laporan, Dokumen, 509.106.000
Rincian Output	: 01 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Rekomendasi, Unit 19.087.000
	: 02 EBA.984	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan 490.019.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7665.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.00	Unit, m2, Paket 34.741.000
Rincian Output	: 01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.00	Unit 34.741.000

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIS JENDERAL

td.
DIDYK CHOIROEL
NIP. 197104161992011001

Lampiran 4 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (Sekretariat Jenderal)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691411/2026



DS-5016-2886-2145-8358

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	:	(14)	KALIMANTAN TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(691411)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah
Sebesar	:	Rp. 610.078.000	(ENAM RATUS SEPULUH JUTA TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
146.01.WA Program Dukungan Manajemen
146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

Jumlah Uang
Rp. 610.078.000
Rp. 610.078.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	610.078.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PALANGKARAYA (043) Rp. 610.078.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : DIPA- 146.01.1.691411/2026 I A. INFORMASI KINERJA



DS-5016-2886-2145-8358

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH
Kode/Nama Satker : (691411) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman : I A. 1

Program	:	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen			610.078.000
Kegiatan	:	7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			610.078.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit Layanan	575.337.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	31.811.000
	:	02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	543.526.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7665.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	8,00	Unit, m2, Paket	34.741.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	8,00	Unit	34.741.000

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
DIDYK CHOIROEL
NIP. 197104161992011001

Lampiran 5 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Ditjen Kawasan Permukiman)


**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Octavianus Siahaan**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
 Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Maret 2026

Pihak Kedua


Fitrah Nur
 NIP. 196704191994031003

Pihak Pertama


Octavianus Siahaan
 NIP. 198710222010121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 dokumen
		2 Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 dokumen
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1 Jumlah Layanan BMN	1 Layanan
		2 Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
		3 Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

PAGU APBN

Rp	309.405.000,00
Rp	31.441.000,00
Rp	31.404.000,00
Rp	372.250.000,00

Jakarta, 27 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN


FITRAH NUR
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I

OCTAVIANUS SIAHAAN

Lampiran 6 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Ditjen Kawasan Permukiman)


 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
 TAHUN ANGGARAN 2026**
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691463/2026


DS:4779-4648-0515-6144

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. Unit Organisasi | : (03) | DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN |
| 3. Provinsi | : (13) | KALIMANTAN BARAT |
| 4. Kode/Nama Satker | : (691463) | Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I |
| Sebesar | : Rp. | 309.405.000 (TIGA RATUS SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS LIMA RIBU RUPIAH) |

 Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 309.405.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNPB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNPB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN PONTIANAK | (042) Rp. | 309.405.000 |
|-------------------|-----------|-------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

 Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

 ttd.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
 TAHUN ANGGARAN 2026**
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691463/2026
I.A. INFORMASI KINERJA


DS:4779-4648-0515-6144

 Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
 Kode/Nama Satker : (691463) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Halaman : I A. 1

Program	: 146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		220.194.000
Kegiatan	: 7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman		220.194.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7659.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00 dokumen, Peta, Data	43.800.000
Rincian Output	: 01 BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1,00 dokumen	43.800.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7659.CBR	Dukungan Teknis	1,00 Dokumen	88.717.000
Rincian Output	: 01 CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1,00 Dokumen	88.717.000
Klasifikasi Rincian Output 3	: 7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1,00 Rekomendasi Kebijakan	87.677.000
Rincian Output	: 01 PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PN)	1,00 Rekomendasi Kebijakan	87.677.000
Program	: 146.03.WA	Program Dukungan Manajemen		89.211.000
Kegiatan	: 7674	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		89.211.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	89.211.000
Rincian Output	: 01 EBA.962	Layanan Umum	1,00 Layanan	58.411.000
	: 02 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1,00 Layanan	12.300.000
	: 03 EBA.Z06	Layanan BMN	1,00 Layanan	18.500.000

 Jakarta, 01 Desember 2025
 a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

 ttd.
 Ir. Fitrah Nur, M.Si
 NIP. 196704191994031003

Lampiran 7 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Ditjen Kawasan Permukiman)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691464/2026



DS-4599-8000-1105-9029

Revisi ke 01

Tanggal : 29 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. Unit Organisasi | : (03) | DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN |
| 3. Provinsi | : (13) | KALIMANTAN BARAT |
| 4. Kode/Nama Satker | : (691464) | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat |
| Sebesar | : Rp. | 31.441.000 (TIGA PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.03.WA Program Dukungan Manajemen
146.03.WA. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|-------------|-----|------------|
| 1. Rupiah Mumi | Rp. | 31.441.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 | Jumlah Uang | Rp. | 31.441.000 |
| 2. PNBP | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 | | Rp. | 31.441.000 |
| - PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 | | | |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 | | | |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 | | | |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 | | | |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 | | | |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 31.441.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Pengeluaran Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam DIPA Petikan disetiap dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : DIPA- 146.03.1.691464/2026 I A. INFORMASI KINERJA



DS-4599-8000-1105-9029

- Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode/Nama Satker : (691464) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.03.WA	Program Dukungan Manajemen			31.441.000
Kegiatan	: 7674	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			31.441.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:				
Klasifikasi Rincian Output	1 : 7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	31.441.000
Rincian Output	: 01 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	31.441.000

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Ir. Fitrah Nur, M.Si
NIP. 196704191964031003

Lampiran 8 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (Ditjen Kawasan Permukiman)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691465/2026



DS-3206-9009-5505-6908

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01

Tanggal : 29 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. Unit Organisasi | : (03) | DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN |
| 3. Provinsi | : (14) | KALIMANTAN TENGAH |
| 4. Kode/Nama Satker | : (691465) | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah |
| Sebesar | : Rp. | 31.404.000 (TIGA PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS EMPAT RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.WA Program Dukungan Manajemen

146.03.WA. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

	Rp.	Jumlah Uang	31.404.000
	Rp.		31.404.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 31.404.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|----------------------|-----------|------------|
| 1. KPPN PALANGKARAYA | (043) Rp. | 31.404.000 |
|----------------------|-----------|------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : DIPA- 146.03.1.691465/2026 I A. INFORMASI KINERJA



DS-3206-9009-5505-6908

- | | | |
|----------------------------|------------|---|
| Kementerian Negara/Lembaga | : (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Unit Organisasi | : (03) | DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN |
| Provinsi | : (14) | KALIMANTAN TENGAH |
| Kode/Nama Satker | : (691465) | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah |

Halaman : I A. 1

Program	:	146.03.WA	Program Dukungan Manajemen		31.404.000		
Kegiatan	:	7674	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		31.404.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	31.404.000
Rincian Output	:	01	EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	31.404.000

Jakarta, 01 Desember 2025
 a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

td.
 Ir. Fitrah Nur, M.Si
 NIP. 196704191994031003

Lampiran 9 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perdesaan)



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Octavianus Siahaan**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

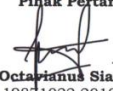
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 April 2026



Imran
 NIP. 19731026 199302 1 001



Octavianus Siahaan
 NIP. 19871022 201012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendas Kebijakan
		2	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
		3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan
2	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan	1	Koordinasi dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
3	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
		2	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
4	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Rekomendas Kebijakan
5	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendas Kebijakan
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
		3	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	107 Unit
		4	Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	25 Unit
Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

PAGU APBN

Rp	443,670,000.00
Rp	9,344,983,000.00
Rp	5,699,696,000.00
Rp	15,488,349,000.00

Jakarta, 02 April 2026

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN



IMRAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I


OCTAVIANUS SIAHAAN

Lampiran 10 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perdesaan)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691517/2026



DS:3687-4254-0178-8509

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	: (13)	KALIMANTAN BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691517)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I
Sebesar	: Rp.	443.670.000 (EMPAT RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	443.670.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK	(042) Rp.	443.670.000
-------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

tdt.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : DIPA- 146.04.1.691517/2026 I A. INFORMASI KINERJA



DS:3687-4254-0178-8509

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode/Nama Satker : (691517) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Halaman : I A. 1

Program	:	146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			402.095.000	
Kegiatan	:	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			402.095.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perdesaan				
	:	2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perdesaan				
	:	3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perdesaan				
	:	4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan				
	:	5. 07	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	3,00	Rekomendasi Kebijakan	217.240.000
Rincian Output	:	01	ABF.007	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	20.533.000
	:	02	ABF.008	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	146.152.000
	:	03	ABF.009	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	50.555.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7660.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	dokumen, Peta, Data	26.448.000
Rincian Output	:	01	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00	dokumen	26.448.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7660.CBR	Dukungan Teknis	2,00	Dokumen	59.639.000
Rincian Output	:	01	CBR.001	Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	1,00	Dokumen	32.819.000
	:	02	CBR.002	Dukungan Teknis Penghunan Perumahan Perdesaan	1,00	Dokumen	26.820.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691517/2026
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
 Kode>Nama Satker : (691517) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	4	:	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2,00	Laporan, Layanan	77.062.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan	1,00	Laporan	39.123.000
	:	02	FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1,00	Laporan	37.939.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	7660.PEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	21.706.000
Rincian Output	:	01	PEA.001	Koordinasi dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perdesaan	1,00	kegiatan	21.706.000
Program	:	146.04.WA		Program Dukungan Manajemen			41.575.000
Kegiatan	:	7675		Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			41.575.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	41.575.000
Rincian Output	:	01	EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	25.575.000
	:	02	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	16.000.000

Jakarta, 01 Desember 2025
 a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan
 ttd.
 Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
 197310261993021001

Lampiran 11 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Ditjen Perumahan Perdesaan)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691518/2026



DS-0103-9010-6514-2000

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	: (13)	KALIMANTAN BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691518)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
Sebesar	: Rp. 9.344.983.000	(SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	9.344.983.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK	(042) Rp.	9.344.983.000
-------------------	-----------	---------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : DIPA- 146.04.1.691518/2026 I A. INFORMASI KINERJA



DS-0103-9010-6514-2000

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
 Kode/Nama Satker : (691518) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Halaman : I A. 1

Program	: 146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.337.483.000
Kegiatan	: 7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	9.337.483.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perdesaan	
	: 2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perdesaan	
	: 3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perdesaan	
	: 4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	
	: 5. 07	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	
Klasifikasi Rincian Output	1 : 7660.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	107,00 unit, Hektar 9.311.318.000
Rincian Output	: 01 CBB.001	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	107,00 unit 9.311.318.000
Klasifikasi Rincian Output	2 : 7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00 Laporan, Layanan 26.165.000
Rincian Output	: 01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00 Laporan 26.165.000
Program	: 146.04.WA	Program Dukungan Manajemen	7.500.000
Kegiatan	: 7675	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	7.500.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:		
Klasifikasi Rincian Output	1 : 7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit 7.500.000
Rincian Output	: 01 EBA.962	Layanan Umum	1,00 Layanan 7.500.000

Jakarta, 01 Desember 2025
 a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

td.
 Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
 197310261993021001

Lampiran 12 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (Ditjen Perumahan Perdesaan)


 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691519/2026



DS:3582-2751-3097-3587

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|---------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. Unit Organisasi | : (04) | DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN |
| 3. Provinsi | : (14) | KALIMANTAN TENGAH |
| 4. Kode>Nama Satker | : (691519) | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah |
| Sebesar | : Rp. 5.699.696.000 | (LIMA MILIAR ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir
Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 5.699.696.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|----------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN PALANGKARAYA | (043) Rp. | 5.699.696.000 |
|----------------------|-----------|---------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Pencairan Dana dan Pengalokasian Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

 Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

 ttd.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 146.04.1.691519/2026

I A. INFORMASI KINERJA



DS:3582-2751-3097-3587

 Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
 Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH
 Kode>Nama Satker : (691519) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

				Halaman : I A. 1	
Program	: 146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			5.676.800.000
Kegiatan	: 7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			5.676.800.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perdesaan			
	: 2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perdesaan			
	: 3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perdesaan			
	: 4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan			
	: 5. 07	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen			
Klasifikasi Rincian Output	1 : 7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	35.180.000
Rincian Output	: 01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00	Laporan	35.180.000
Klasifikasi Rincian Output	2 : 7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	25,00	unit, Hektar	5.641.620.000
Rincian Output	: 01 RBB.002	Rumah Khusus Perumahan Perdesaan (PN)	25,00	unit	5.641.620.000
Program	: 146.04.WA	Program Dukungan Manajemen			22.896.000
Kegiatan	: 7675	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			22.896.000
Indikator Kinerja Kegiatan :					
Klasifikasi Rincian Output	1 : 7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	22.896.000
Rincian Output	: 01 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	22.896.000

 Jakarta, 01 Desember 2025
 a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

 ttd.
 Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.
 197310261993021001

Lampiran 13 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perkotaan)


**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Octavianus Siahaan**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan 1

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Maret 2026

Pihak Kedua


Sri Haryati
 NIP. 197107071997032004

Pihak Pertama


Octavianus Siahaan
 NIP 198710222010121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemogramman, Penganggaran, Pemaantuan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Penyelenggaraan perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan
2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Layanan BMN	1 Layanan
		2 Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
		3 Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan 1
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

PAGU APBN

Rp	384.154.000,00
Rp	26.520.000,00
Rp	23.374.000,00
Rp	434.048.000,00

Jakarta, 30 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN


SRI HARYATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I


OCTAVIANUS SIAHAAN

Lampiran 14 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perkotaan)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691571/2026



DS.6998-2246-8477-0805

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01

Tanggal : 29 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. Unit Organisasi | : (05) | DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN |
| 3. Provinsi | : (13) | KALIMANTAN BARAT |
| 4. Kode/Nama Satker | : (691571) | Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I |
| Sebesar | : Rp. | 384.154.000 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SERATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 384.154.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | 0 | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| D. Pencairan dana dilakukan melalui : | | | 6. SSSN PBS | Rp. | 0 |
| 1. KPKN PONTIANAK | (042) Rp. | 384.154.000 | | | |

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : DIPA- 146.05.1.691571/2026 I A. INFORMASI KINERJA



DS.6998-2246-8477-0805

- | | | |
|----------------------------|------------|--|
| Kementerian Negara/Lembaga | : (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Unit Organisasi | : (05) | DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN |
| Provinsi | : (13) | KALIMANTAN BARAT |
| Kode/Nama Satker | : (691571) | Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I |

Halaman : I A. 1

Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			283.579.000	
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			283.579.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan	238.072.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	61.014.000
		02	ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyediaan Lahan, Perizinan dan Penghunan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	36.291.000
		03	ABF.003	Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	36.291.000
		04	ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	52.238.000
		05	ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	52.238.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	45.507.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Laporan	45.507.000
Program	:	146.05.WA	Program Dukungan Manajemen			100.575.000	
Kegiatan	:	7676	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			100.575.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	100.575.000
Rincian Output	:	01	EBA.956	Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	1,00	Layanan	54.000.000
		02	EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	24.025.000
		03	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	22.550.000

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

td.
SRI HARYATI
197107071997032004

Lampiran 15 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Ditjen Perumahan Perkotaan)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691572/2026



DS:1018-1501-4630-6910

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	:	(13)	KALIMANTAN BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(691572)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
Sebesar	:	Rp. 26.520.000	(DUA PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	26.520.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK	(042) Rp.	26.520.000
-------------------	-----------	------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : DIPA- 146.05.1.691572/2026 I A. INFORMASI KINERJA



DS:1018-1501-4630-6910

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode/Nama Satker : (691572) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Halaman : I A. 1

Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		17.813.000
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		17.813.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7661.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00 Laporan, Layanan	17.813.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00 Laporan	17.813.000
Program	:	146.05.WA	Program Dukungan Manajemen		8.707.000
Kegiatan	:	7676	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		8.707.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7676.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit Layanan	8.707.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1,00 Layanan	8.707.000

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

td.
SRI HARYATI
197107071997032004

Lampiran 16 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (Ditjen Perumahan Perkotaan)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691573/2026



DS.7625-8186-2781-6047

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01

Tanggal : 29 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	:	(14)	KALIMANTAN TENGAH
4. Kode>Nama Satker	:	(691573)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah
Sebesar	:	Rp. 23.374.000	(DUA PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	23.374.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PALANGKARAYA (043) Rp. 23.374.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : DIPA- 146.05.1.691573/2026 I A. INFORMASI KINERJA



DS.7625-8186-2781-6047

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH
Kode>Nama Satker : (691573) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman : I A. 1

Program	:	146.05.1A	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		17.356.000
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		17.356.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7661.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan 17.356.000
Rincian Output	:	01	FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Laporan 17.356.000
Program	:	146.05.WA	Program Dukungan Manajemen		6.018.000
Kegiatan	:	7676	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		6.018.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7676.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit 6.018.000
Rincian Output	:	01	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan 6.018.000

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

td.
SRI HARYATI
197107071997032004

Lampiran 17 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko)


**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
 REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arifay Saini**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
 Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Januari 2026

Pihak Kedua


Azis Andriansyah
 NRP. 77050672

Pihak Pertama


Arifay Saini
 NIP. 197308272003121005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I

DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	3 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	1 Laporan

KEGIATAN

1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN

Rp

157,614,000.00

Jakarta, 28 Januari 2026

**DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN
RISIKO**

AZIS ANDRIANSYAH
**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KALIMANTAN I**

ARIFAY SAINI

Lampiran 18 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691606/2026



DS 0681-5382-3847-4260

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. Unit Organisasi | : (06) | DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO |
| 3. Provinsi | : (13) | KALIMANTAN BARAT |
| 4. Kode/Nama Satker | : (691606) | Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I |
| Sebesar | : Rp. | 157.614.000 (SERATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.06.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
146.06.IA.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Uang
Rp. 157.614.000
Rp. 157.614.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 157.614.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNPB | Rp. | 0 | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNPB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 157.614.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : DIPA- 146.06.1.691606/2026 I A. INFORMASI KINERJA



DS 0681-5382-3847-4260

- Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode/Nama Satker : (691606) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Halaman : I A. 1

Program	:	146.06.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				157.614.000
Kegiatan	:	7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman				157.614.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	3,00	Rekomendasi Kebijakan	131.074.000
Rincian Output	:	01	ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1,00	Rekomendasi Kebijakan	33.218.000
		02	ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	2,00	Rekomendasi Kebijakan	97.856.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	26.540.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1,00	Laporan	26.540.000

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

td.
AZIS ANDRIANSYAH
NRP. 77050672



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I



Jl. Imam Bonjol No.116, Benua Melayu Darat, Pontianak
Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat



bp3kp.kalimantan1@pkp.go.id